



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2018
TENTANG
PENANGANAN SAMPAH LAUT**

RENCANA AKSI NASIONAL PENANGANAN SAMPAH LAUT TAHUN 2018-2025

STRATEGI 1. GERAKAN NASIONAL PENINGKATAN KESADARAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1	Peningkatan Kesadaran Masyarakat	Menyelenggarakan gerakan nasional sosialisasi mengenai dampak negatif sampah di laut, terutama plastik bagi kesehatan dan ekosistem, serta sosialisasi terkait pengelolaan sampah terpadu	Meningkatnya pemahaman masyarakat di kota, pesisir, dan Daerah Aliran Sungai pada sungai-sungai utama, terkait dampak sampah di laut, terutama sampah plastik bagi kesehatan dan ekosistem, serta sosialisasi terkait pengelolaan sampah terpadu	304 kabupaten/kota	28	38	38	38	41	41	40	40	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Pemerintah Daerah (Pemda)	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		Menyelenggarakan gerakan nasional sosialisasi penggunaan plastik yang aman untuk kesehatan dan lingkungan, mudah terurai, dan dapat didaur ulang	Meningkatnya kesadaran masyarakat terkait penggunaan jenis plastik yang aman untuk kesehatan dan lingkungan, mudah terurai, dan dapat didaur ulang	111 kabupaten/kota	1	5	10	15	20	20	20	20	Kementerian Perindustrian (Kemenperin)	KLHK, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN), Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Melakukan sosialisasi pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah	Meningkatnya pemanfaatan sampah di lingkungan industri	14 kawasan industri dan sentra industri kecil dan menengah	-	2	2	2	2	2	2	2	Kemenperin	KLHK, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Menyelenggarakan pelatihan pemilahan dan pemanfaatan sampah plastik	Terlaksananya pelatihan pemilahan dan pemanfaatan sampah plastik	274 kabupaten/kota	24	35	35	36	36	36	36	36	KLHK	KKP, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM),	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Jangka Waktu							Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				2025
														KemenBUMN, Kemperin, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbud), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Pemda, perguruan tinggi	ketentuan peraturan perundang-undangan
		Menyelenggarakan Program "Sekolah Bahari Indonesia"	Meningkatnya kesadaran masyarakat pesisir tentang pengelo-	24 kegiatan	3	3	3	3	3	3	3	3	KKP	KLHK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud),	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			laan pantai dan laut, serta menumbuhkan kepedulian cinta lingkungan											Bekraf, Pemda	sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Menyelenggarakan bimbingan teknis pemilihan sampah plastik sebagai bahan baku industri daur ulang plastik	Terselenggaranya bimbingan teknis pemilihan sampah plastik sebagai bahan baku industri daur ulang plastik	350 orang (pelaku daur ulang dan Pemda)	-	50	50	50	50	50	50	50	Kemenperin	KLHK, Kementerian Sosial (Kemensos), Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Kampanye gerakan nasional peduli sampah di laut termasuk sampah plastik melalui media massa cetak dan elektronik, media sosial, dan media komunikasi	Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan sampah di laut	Minimal 1 kali per bulan di media cetak dan elektronik nasional	12	12	12	12	12	12	12	12	Kemenkom-info	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenco Maritim), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenco PMK), KLHK, KKP, Kemen-	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		lainnya												BUMN, Kemenkes, Pemda		
		Menyelenggarakan kampanye peran industri plastik yang aman untuk kesehatan dan lingkungan, mudah terurai, dan dapat didaur ulang dalam mengurangi timbulan sampah plastik	Terselenggaranya kampanye peran industri plastik yang aman untuk kesehatan dan lingkungan, mudah terurai, dan dapat didaur ulang dalam mengurangi timbulan sampah plastik	7 paket advertorial	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Kemenperin	KLHK, Kemenkominfo	APBN dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Membentuk program kolaborasi dengan dunia usaha, media massa, kelompok masyarakat, dan lembaga adat/agama	Terbentuknya program kolaborasi dengan dunia usaha, media massa, kelompok masyarakat, dan lembaga adat/agama	16 kolaborasi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	KLHK	Kemenko Maritim, Kemenkop-UKM, KemenBUMN, Kemendagri, Kemenperin, Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Agama, (Kemenag), Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Jangka Waktu							Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				2025
		Memberikan penghargaan untuk dunia usaha, media massa, kelompok masyarakat, dan tokoh agama/masyarakat terkait inovasi dan/atau kepeloporan dalam pengelolaan daur ulang sampah termasuk plastik	Terselenggaranya kegiatan pemberian penghargaan secara nasional	1 tahun sekali	1	1	1	1	1	1	1	1	KLHK	Kemenko Maritim, Kemenristekdikti, Kemenperin, Kemendag, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2	Gerakan Nasional Peduli Sampah di Laut melalui Pendidikan bagi Aparatur	Melakukan kerja sama dengan kementerian/ lembaga terkait untuk menyelenggarakan Program Peduli Lingkungan dan Kebersihan	Terselenggaranya kegiatan Peduli Lingkungan dan Kebersihan di lingkungan kementerian/ lembaga, sekolah, dan kampus	95 kegiatan	10	10	15	15	15	15	10	5	Kemenko Maritim	Kementerian Pdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB), KLHK, Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenag, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
	Sipil Negara (ASN), Anak Sekolah, Maha- siswa, dan Pendidik	Penerapan pendidikan bu- daya/perilaku hidup bersih dan sehat serta sadar lingkung- an pada anak usia prasekolah dan sekolah	Masuknya mate- ri pengajaran budaya/perilaku hidup bersih dan sehat serta sadar lingkung- an dalam muat- an kurikulum pendidikan anak usia sekolah	2.400 sekolah /lemba- ga pen- didikan	300	300	300	300	300	300	300	300	Kemendikbud	Kemenko Maritim, Kemen- ristekdikti, Kemenag, Kemenperin, Pemda	APBN, APBD



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

STRATEGI 2. PENGELOLAAN SAMPAH YANG BERSUMBER DARI DARAT

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1	Pengendalian Sampah pada Daerah Aliran Sungai	Penyediaan prasarana pengambilan sampah di sungai	Tersedianya prasarana pengambilan sampah di sungai	Wilayah kerja 30 Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai	5	5	5	5	4	3	2	1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR)	KLHK, Kementerian, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Pengelolaan sampah termasuk sampah plastik di kabupaten/kota	Tersedianya sarana pengelolaan sampah termasuk sampah plastik di Tempat Pengolahan Sampah <i>Reduce-Reuse-Recycle</i> (TPS 3R) dan pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU)	301 kabupaten/kota	69	72	50	30	20	20	20	20	20	KemenPUPR	KLHK, Kementerian, Pemda



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		Pengendalian sampah pada muara sungai	Terkelolanya muara sungai dari sampah di laut termasuk sampah plastik	13 muara sungai	3	5	5	-	-	-	-	-	KKP	Kemenristekdikti, Kemendagri, KemenPUPR, KLHK, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pemda, BUMN	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2	Pengendalian Sampah Plastik dari Sektor Industri Hulu	Mendorong industri hulu untuk memproduksi bahan polimer plastik yang mudah terurai dan dapat didaur ulang (<i>degradable plastic</i>)	Peningkatan produksi plastik yang mudah terurai dan mudah didaur ulang	Sampai dengan 5% dari kapasitas produksi plastik	1%	2%	2%	3%	4%	4%	5%	5%	Kemenperin	Kemenristekdikti, KLHK	APBN dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		Penyusunan kajian insentif industri plastik yang mudah terurai dan dapat didaur ulang	Tersusunnya kajian insentif industri plastik yang mudah terurai dan dapat didaur ulang	2 kajian	1	1	-	-	-	-	-	-	Kemenperin	Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas), KLHK, Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Penyusunan pedoman <i>Good Manufacturing Process</i> (GMP) produk plastik mudah terurai dan dapat didaur ulang	Tersedianya pedoman GMP produk plastik yang mudah terurai dan dapat didaur ulang	2 pedoman	1	-	1	-	-	-	-	-	Kemenperin	KLHK, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	APBN dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		Pembuatan purwarupa peralatan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)	Tersedianya purwarupa PLTSa dengan kapasitas hingga 2.000 ton/hari	1 purwarupa	-	-	1	-	-	-	-	-	Kemenperin	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen-ESDM), KLHK, KemenPUPR, BPPT, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Pembangunan unit pemanfaatan plastik menjadi bahan bakar minyak	Terbangunnya unit pemanfaatan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak	1 unit pengolahan sampah plastik	-	-	1	-	-	-	-	-	Kemenperin	KemenESDM, KLHK, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Menyusun peraturan tentang cukai plastik	Penetapan Peraturan tentang Cukai Plastik	1 Peraturan Pemerintah	1	-	-	-	-	-	-	-	Kemenkeu	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenuk), Kemenperin, KLHK	APBN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Jangka Waktu							Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				2025
		Penyediaan alat atau mesin pendaur ulang sampah plastik	Tersedianya alat atau mesin pendaur ulang sampah plastik	10 lokasi	-	-	2	2	2	2	2	-	Kemenperin	Kemenpar, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Menyusun profil produsen dan stok plastik cacah daur ulang	Tersedianya informasi produsen dan stok plastik cacah	1 profil	-	1	-	-	-	-	-	-	Kemenperin	KemenPUPR, KLHK, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	APBN dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Penyusunan kajian penyebaran industri daur ulang plastik ke daerah destinasi wisata	Tersusunnya kajian penyebaran industri daur ulang plastik ke daerah destinasi wisata	2 kajian	-	1	1	-	-	-	-	-	Kemenperin	Kemenpar, KLHK, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Jangka Waktu							Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				2025
		Mendorong tumbuhnya industri daur ulang	Peningkatan jumlah industri daur ulang	125 industri daur ulang	10	10	15	15	15	20	20	20	Kemenperin	KLHK, Kemen- dag, Kemenris- tekdiikti, KemenkopUKM, Pemda, swasta	APBN, APBD, dan sumber da- na lainnya yang sah sesuai ke- tentuan pera- turan perun- dang-undangan
		Membentuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen	Penetapan Pera- turan Menteri Lingkungan Hi- dup dan Kehu- tanan tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen	1 Pera- turan Menteri	-	1	-	-	-	-	-	-	KLHK	Kemenko Maritim, Kemenperin, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)	APBN
		Mendorong in- dustri hilir un- tuk memproduksi plastik yang mudah terurai (<i>biodegradable</i>) dan dapat didaur ulang	Peningkatan produksi plastik yang mudah terurai dan dapat didaur ulang	Sampai dengan 25% dari ka- pasitas produk- si plas- tik	5%	10%	10%	15%	20%	20%	25%	25%	Kemenperin	KLHK, Kemen- dag, Kemenris- tekdiikti, Kemen- kopUKM, Pemda, swasta	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesu- ai ketentuan peraturan perundang- undangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

STRATEGI 3. PENANGGULANGAN SAMPAH DI PESISIR DAN LAUT

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1	Pengelolaan Sampah Plastik yang Berasal dari Aktivitas Transportasi Laut	Melakukan pemantauan bersama pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 29 Tahun 2014	Terwujudnya peningkatan implementasi Permenhub Nomor 29 Tahun 2014	1.278 kapal penumpang yang melaksanakan Permenhub Nomor 29 Tahun 2014	50%	75%	100%	-	-	-	-	-	Kementerian Perhubungan (Kemenhub)	Kemenko Maritim, Badan Keamanan Laut (Bakamla), KLHK	APBN
		Pembangunan sarana dan prasarana <i>reception facility</i> di setiap pelabuhan umum	Tersedianya sarana dan prasarana <i>reception facility</i> di setiap pelabuhan umum	112 pelabuhan	6	6	18	18	18	18	18	10	Kemenhub	KKP, KLHK, KemenPUPR, KemenBUMN, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Pembangunan sarana dan	Tersedianya sarana dan	23 PPN /PPS	4	3	4	3	3	2	2	2	KKP	KLHK, Kemenhub, Kemen-	APBN, APBD, dan sumber



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		prasarana penanganan sampah di setiap Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)	prasarana penanganan sampah di setiap PPS dan PPN											PUPR, Pemda	dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Penerapan sertifikasi manajemen lingkungan internasional ISO 14001 untuk pengelolaan sampah dan limbah di setiap pelabuhan umum	Diterapkannya sertifikasi manajemen lingkungan internasional ISO 14001 untuk pengelolaan sampah dan limbah di pelabuhan umum	67 pelabuhan	6	7	7	7	8	8	10	14	Kemenuh	KKP, KLHK, KemenBUMN, KemenPUPR, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Penerapan sertifikasi manajemen lingkungan ISO	Diterapkannya sertifikasi manajemen lingkungan ISO 14000	22 pelabuhan	2	2	2	3	3	3	3	4	KKP	KLHK, Kemenuh, KemenPUPR, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu							Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				2025
		14000 untuk pengelolaan sampah dan limbah di setiap PPS dan PPN	untuk pengelolaan sampah dan limbah di setiap PPS dan PPN												sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Sosialisasi tata cara pengelolaan sampah bagi penumpang oleh awak kapal saat kapal akan berlayar	Tersosialisasinya tata cara pengelolaan sampah di kapal penumpang ketika berlayar	1.278 kapal penumpang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kemenhub	KKP, KLHK, KemenBUMN, KemenPUPR, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Sosialisasi tata cara pembuangan sampah kepada penyelenggara pelabuhan dan pemangku kepentingan terkait di pelabuhan	Sosialisasi manajemen pengelolaan sampah	Seluruh pemangku kepentingan pada 323 UPT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kemenhub	KKP, KLHK, KemenBUMN, KemenPUPR, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
2	Pengelolaan Sampah Plastik yang Berasal dari Kegiatan di Kawasan Wisata Bahari	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan sampah dari kegiatan di destinasi wisata bahari	Terbitnya peraturan tentang SOP pengelolaan sampah dari kegiatan di destinasi wisata bahari	1 Peraturan Menteri Pariwisata	1	-	-	-	-	-	-	-	Kemenpar	KLHK, KKP, KemenPUPR, Pemda	APBN, APBD
		Penerapan SOP pengelolaan sampah dari kegiatan di destinasi wisata bahari	Terlaksananya SOP pengelolaan sampah dari kegiatan di destinasi wisata bahari	Implementasi SOP pengelolaan sampah di destinasi wisata bahari	v	v	v	v	v	v	v	v	Kemenpar	KLHK, KKP, KemenPUPR, Pemda, masyarakat	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Membangun sarana dan prasarana pengelolaan sampah di kawasan desti-	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah plastik di kawasan destinasi	Sarana dan prasarana di 17 kawasan	3	2	2	2	2	2	2	2	KemenPUPR	KLHK, KKP, Kemenpar, Kemendagri, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		nasi wisata bahari	wisata bahari	destinasi wisata bahari											peraturan perundang-undangan
3	Pengelolaan Sampah Plastik yang Berasal dari Kegiatan Kelautan dan Perikanan	Penyusunan SOP kegiatan perikanan tangkap yang ramah lingkungan	Tersedianya peraturan tentang SOP kegiatan perikanan tangkap yang ramah lingkungan	1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan	-	1	-	-	-	-	-	-	KKP	KLHK, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Penyusunan SOP kegiatan perikanan budidaya yang ramah lingkungan	Tersedianya peraturan tentang SOP kegiatan perikanan budidaya yang ramah lingkungan	1 Peraturan Direktur Jenderal	-	-	1	-	-	-	-	-	KKP	KLHK, Pemda, masyarakat	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
4	Pengelolaan Sampah yang Berasal dari Aktivitas di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Membangun fasilitas Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Pusat Daur Ulang di pulau-pulau kecil terluar	Tersedianya fasilitas TPS atau pusat daur ulang di pulau-pulau kecil terluar	Fasilitas TPS di 39 pulau	5	5	5	5	5	5	5	4	KKP	KemenPUPR, Kemendagri, KLHK, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
		Penanggulangan sampah plastik di laut yang mencakup persoalan lintas batas negara	Terbangunnya kerja sama internasional penanggulangan sampah plastik di laut	Kesepakatan internasional mengenai penanggulangan sampah plastik di laut	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)	Kemenko Maritim, KemenPUPR, KLHK, KKP, Kemenhub, Kemendag	APBN dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Menyelenggarakan aksi bersama	Terselenggaranya aksi bersama pembersihan	160 kegiatan	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Kemenko Maritim	KKP, KLHK, Kemenhub, Pemda, masya-	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		pembersihan sampah plastik di pesisir dan pulau-pulau kecil	sampah plastik di pesisir dan pulau-pulau kecil											rakat	yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Menyelenggarakan Gerakan Nasional Bersih Pantai dan Laut	Terselenggaranya Gerakan Nasional Bersih Pantai dan Laut	24 lokasi	3	3	3	3	3	3	3	3	KKP	Kemenko Maritim, KLHK, Kemenhub, TNI AL, Pemda, masyarakat	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

STRATEGI 4. MEKANISME PENDANAAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN, PENGAWASAN, DAN PENEGAKAN HUKUM

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1	Diversifikasi Skema Pendanaan di Luar APBN/ APBD	Mendorong skema pendanaan pengelolaan sampah plastik melalui Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS), hibah <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR), dana masyarakat, dan sumber-sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya kegiatan pengelolaan sampah plastik yang didanai KPS, hibah CSR, dana masyarakat, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	9 proyek	1	2	1	1	1	1	1	1	Kemenko Maritim	KemenPPN/ Bappenas, Kemenkeu, KLHK, KKP, Kemendagri, KemenPUPR, KemenBUMN, Kemenlu, BKPM, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
2.	Memperkuat Kelembagaan	Mendorong komitmen eksekutif (pusat dan daerah) untuk memprioritaskan alokasi anggaran di sektor pengelolaan sampah plastik	Prioritas alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah plastik	Prioritas alokasi anggaran untuk kegiatan pengelolaan sampah plastik yang tercantum dalam Rencana Aksi Nasional tahun berjalan	v	v	v	v	v	v	v	v	KemenPPN/Bappenas	Kemenkeu, KLHK, Kemen dagri, KKP, KemenPUPR, Kemenhub, Sekretariat Kabinet (Setkab), Pemda	APBN, APBD
		Pelaksanaan pembinaan umum di daerah terkait pengelolaan sampah plastik	Terlaksananya pembinaan umum (asis- tensi, super- visi, koordina- si, bimbingan teknis, pema-	34 provinsi	5	5	5	5	5	5	4	-	Kemendagri	Setkab, Pemda	APBN, APBD



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			tauan dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan umum) di daerah												
		Pembentukan unit pengelolaan sampah di kawasan destinasi wisata bahari	Terbentuknya unit pengelolaan sampah di kawasan destinasi wisata bahari	Unit pengelolaan sampah di 10 kawasan destinasi prioritas wisata bahari nasional	5	5	-	-	-	-	-	-	Kemenpar	KLHK, KKP, KemenPUPR, KemendesPDT, Pemda	APBN, APBD
3.	Meningkatkan Efektivitas Pengawasan dan Pelaksanaan	Peningkatan koordinasi penindakan terhadap pelanggaran terkait sampah di laut	Meningkatnya koordinasi melalui operasi penindakan pelanggaran terkait sampah di laut	27 operasi laut dan 9 operasi udara maritim per tahun	36	36	36	36	36	36	36	36	Bakamla	KLHK, Kemenhub, Kemenkeu, KKP, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), TNI AL	APBN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
	Penegakan Hukum	Pemberian <i>reward and punishment</i> kepada Pemda, pengelola, dan masyarakat atas ketaatan dan pelanggaran SOP pengelolaan sampah di kawasan destinasi wisata bahari	Meningkatnya ketaatan Pemda, pengelola, dan masyarakat dalam menjaga kebersihan kawasan destinasi wisata bahari	<i>Reward and punishment</i> di kawasan destinasi wisata bahari prioritas nasional	v	v	v	v	v	v	v	v	Kemenpar	KKP, KLHK, Kemendagri, Pemda	APBN, APBD
		Penyusunan regulasi Standar Nasional Indonesia (SNI) plastik yang mudah terurai dan dapat didaur ulang secara wajib	Ditetapkannya peraturan menteri tentang SNI plastik yang mudah terurai dan dapat didaur ulang secara wajib	2 Peraturan Menteri	-	-	-	1	-	-	1	-	Kemenperin	KLHK, Badan Standardisasi Nasional (BSN)	APBN dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

STRATEGI 5. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1.	Memacu Inovasi Pengelolaan dan Mengatasi Pencemaran Sampah di Laut melalui Riset dan Pengembangan	Penyusunan kajian penyebaran industri daur ulang plastik ke daerah destinasi wisata	Tersusunnya kajian penyebaran industri daur ulang plastik ke daerah destinasi wisata	2 kajian	-	1	1	-	-	-	-	-	Kemenperin	Kemenpar, Pemda	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Mendorong penemuan bahan pengganti plastik dengan bahan yang ramah lingkungan	Terciptanya bahan pengganti plastik dengan bahan yang ramah lingkungan	27 bahan dari hasil penelitian (diantaranya penemuan material alat tangkap ikan)	4	3	4	3	4	3	3	3	Kemenristek-dikti	Kemenperin, KLHK, KKP, Bekraf, BPPT, LIPI, Pemda, perguruan tinggi	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		Penyusunan SNI produk plastik yang mudah terurai dan dapat didaur ulang	Tersedianya SNI produk plastik yang mudah terurai dan dapat didaur ulang	4 SNI	-	1	-	1	-	1	-	1	Kemenperin	KLHK, BSN	APBN dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Membangun sistem informasi terpadu untuk pemantauan dan penanggulangan sampah di laut	Tersedianya sistem informasi terpadu sampah plastik di laut untuk pemantauan dan penanggulangan	1 sistem	1	-	-	-	-	-	-	-	Kemenko Maritim	KLHK, KKP, Kemenperin, Kemenhub, Kemenristekdikti, Bakamla, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Informasi Geospasial (BIG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), TNI AL, Polri, perguruan tinggi	APBN dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Sumber Dana
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		Penelitian pencemaran sampah di laut dan dampaknya	Tersedianya data dan hasil kajian dampak sampah di laut	Data dan hasil kajian di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	1	2	2	2	1	1	1	1	KKP	Kemenperin, KLHK, Kemenristekdikti, BPPT, LIPI, TNI AL, Pemda, perguruan tinggi	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Kajian dampak mikro dan nano plastik pada tubuh manusia	Tersedianya hasil kajian dampak mikro dan nano plastik pada tubuh manusia	8 data dan hasil kajian	1	1	1	1	1	1	1	1	Kemenkes	KLHK, Kemenristekdikti, LIPI, Pemda, perguruan tinggi	APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kemaritiman,



Agustina Murbaningsih
Agustina Murbaningsih